

## Ganjar Wanti-wanti Kepala Daerah Waspada Varian Baru Covid-19

SEMARANG (IM) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mewanti-wanti kepala daerah agar mewaspada dan mengantisipasi munculnya varian baru Covid-19 B.1617.2 yang berasal dari India.

"Saya minta hati-hati karena varian baru di Cilacap sudah muncul, jangan sampai menyebar. Saya minta semua kepala daerah waspada," kata Ganjar di Semarang, seperti diberitakan Antara, Senin (24/5).

Ganjar mengaku terus memantau para tenaga kesehatan di RSUD Cilacap yang juga terkonfirmasi positif, sedang dalam proses pemeriksaan.

"Mereka semua sudah diisolasi, untuk para nakes sedang dilakukan pemeriksaan WGS dan ini sedang menunggu hasilnya. Mungkin dalam satu atau dua hari sudah keluar," katanya.

Pihaknya juga melakukan pelacakan kontak terhadap keluarga tenaga kesehatan, sedangkan untuk pelayanan RSUD Cilacap untuk sementara layanan rawat jalan ditutup.

"Untuk layanan rawat jalannya sementara ditutup sampai 26 Mei 2021. Kami lakukan sterilisasi tempat-tempat yang ada di sana," ujarnya. ● pra

## Bupati Tangerang Ajak Perusahaan Ikut dalam Program Vaksinasi Gotong Royong

TANGERANG (IM) - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengajak seluruh perusahaan yang ada di daerah itu untuk mengikuti dan mendukung program vaksinasi gotong royong Covid-19 secara mandiri yang diorganisir oleh pemerintah.

"Saya berharap perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang bisa ikut serta sukseskan program vaksinasi gotong-royong ini. Dengan begitu perusahaan ikut membantu mempercepat proses pemberian vaksin kepada masyarakat luas dengan cara menggandeng pihak swasta atau perusahaan."

"Dengan mempercepat vaksinasi ini bisa meningkatkan derajat dan kesehatan masyarakat. Sehingga, pandemi Covid-19 secara bertahap bisa selesai berakhir," ujarnya.

Vaksinasi gotong-royong juga diharapkan dapat membantu pencapaian target pemulihan ekonomi, setelah adanya pandemi ini ekonomi di sektor domestik sangat terdampak besar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha ini bisa mengembalik pertumbuhan ekonomi ke zona positif. "Tentunya setelah di vaksin para karyawan dan masyarakat dapat menaikkan produktivitasnya yang pada akhirnya meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi," katanya. ● yan



IDN/ANTARA

## TES GENOSE GRATIS PENUMPANG BUS TRANS JAKARTA

Petugas kesehatan dari Puskesmas Larangan membantu calon penumpang bus Trans Jakarta mengikuti tes GeNose 19, di Halte Bus Trans Jakarta Koridor 13 Puri Beta, Larangan, Tangerang, Banten, Senin (24/5). Tes GeNose 19 gratis yang diadakan Pemkot Tangerang bagi penumpang bus yang akan dan dari Jakarta ini bertujuan untuk mendeteksi serta mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.

# Pemprov Banten Raih Opini WTP dari BPK untuk Kelima Kali

"Pemprov Banten mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten, atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini serta bimbingan dan saran-saran perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama masa pemeriksaan," kata Andika Hazrumy.

SERANG (IM) - Pemprov Banten kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kelima kalinya.

Seperti diberitakan Antara, opini WTP tersebut diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2020, atau kelima kalinya setelah meraih opini tersebut sejak tahun 2016.

"Pemprov Banten mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan

Provinsi Banten, atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini serta bimbingan dan saran-saran perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama masa pemeriksaan," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada Rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Kota Serang, di Serang, Senin (24/5).

Pada rapat yang dipimpin

Ketua DPRD Banten Andra Soni tersebut diserahkan secara resmi LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten 2020 oleh Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis.

Menurut Andika, sebagaimana diamanatkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten lebih awal yaitu pada 8 Februari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan.

Andika mengatakan, setelah kurang lebih 2 bulan BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan pemeriksaan, hasilnya menyebutkan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Baik dari aspek pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dari sisi kesesuaian penyajiannya," kata Andika.

Ditambahkan Andika, LHP BPK selanjutnya akan menjadi bahan bagi gubernur dalam menyampaikan pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada DPRD Banten melalui sebuah rancangan peraturan daerah.

Terhadap temuan-temuan pada LHP BPK RI, kata Andika, Pemprov Banten telah menetapkan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Rencana aksi dimaksud di antaranya memerintahkan penyetoran atas kerugian daerah segera tanpa harus menunggu batas waktu yang telah ditentukan. Andika bahkan mengklaim kerugian daerah dimaksud sudah seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

Lebih jauh Andika mengatakan Gubernur Banten juga telah membuat teguran kepada para pejabat terkait agar selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan pada setiap tahap pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Al Muktabar beserta jajarannya untuk selalu meningkatkan pengendalian internal khususnya terhadap hal-hal yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK RI dalam LHP dimaksud.

"Catatan-catatan tersebut di antaranya pengelolaan belanja tidak terduga, penatausahaan kas daerah, pengelolaan hasil pajak, dan administrasi pengelolaan barang milik daerah," katanya.

Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis mengatakan secara prinsip LHP pemerintah atau pemerintah daerah akan dinyatakan WTP apabila temuan BPK menyebutkan kurang dari 3-5 persen.

"Kami di pusat bersama Presiden (Presiden RI Joko Widodo) dan DPR terus mengkaji persentase ini. Tapi untuk sekarang kalau temuan kurang dari 3-5 persen LHP dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan," kata Hari.

Hari mengatakan pada era sekarang ini pemeriksaan LHP pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia masih difokuskan pada pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

"Nanti jika memang tahap ini kita sudah selesai, ke depan kami sedang mengkaji bagaimana opini LHP ini korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat atau azas kemandiriannya," kata Hari. ● pra

## Sachrudin Pantau Pelaksanaan Tes GeNose di Pasar Anyar

TANGERANG (IM) - Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin meninjau langsung pelaksanaan tes GeNose C19 secara acak yang berlangsung di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Senin (24/5). Sachrudin menerangkan pemeriksaan secara acak yang dilakukan baik kepada pengunjung, pedagang maupun petugas yang bekerja di area Pasar Anyar bertujuan untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat dalam berbelanja di pasar.

"Supaya kita tahu kondisi kesehatan kita, dan untuk menjaga orang lain agar tidak tertular Covid-19," ucap Sachrudin saat berbincang dengan sejumlah pedagang yang mengikuti tes GeNose C19, seperti dilansir dari tangerang-kota.go.id, Senin (24/5).

Di hari yang sama, lanjut Sachrudin, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan GeNose C19 di dua tempat berbeda dengan target sasaran di masing-masing titik

sebanyak 200 sampel per hari. "Selain di Pasar Anyar, tes juga dilakukan di Puri Beta dan di wilayah Kecamatan Jatiuwung. Untuk di Jatiuwung, tesnya di wilayah permukiman," ujar Sachrudin dalam tinjauan yang didampingi Dirut PD Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati.

Lebih lanjut ia menjabarkan Pemerintah Kota Tangerang telah menjadwalkan kegiatan pemeriksaan GeNose pada sejumlah titik keramaian yang tersebar di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang selama lima hari ke depan. "Tes GeNose dilakukan di pasar-pasar baik tradisional maupun modern, terminal hingga permukiman," bebernya.

Sebelumnya pemeriksaaan GeNose juga telah dilakukan di dua titik keramaian pada tanggal 22 Mei 2021, dimana dari total 81 sampel yang diperiksa terdapat sebanyak tiga orang dengan hasil positif. "Hasil tes pada Sabtu malam lalu, 1 orang di Tangcity dan 2 orang di Puribeta," tukas Sachrudin. ● yy

## LPM Makmur Jaya Cikande Berhasil Kembangkan Cadangan Pangan

SERANG (IM) - Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) Makmur Jaya di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten mampu mengembangkan cadangan pangan masyarakat hingga mencapai 13 ton gabah. Ketua Kelompok LPM Makmur Jaya H. Saefudin, menjelaskan, bantuan pembangunan lumbung pangan melalui DAK Fisik Bidang Pertanian diperolehnya pada tahun 2013.

Ia menjelaskan, tahun 2015, LPM Makmur Jaya mendapatkan bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian untuk pengisian lumbung senilai Rp20 juta yang dibelikan gabah sebanyak 3,8 ton.

Tahun 2019 stok pangan berkembang menjadi 4,8 ton, dan tahun 2020 kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp40 juta yang dibelikan gabah sebanyak 8 ton. "Total stok di lumbung yang terjaga sebagai cadangan pangan sebesar 13 ton gabah," ujar Saefudin, seperti dilansir dari Antara, Senin (24/5).

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam mengelola LPM, stok cadangan pangan dapat dipinjam oleh anggota saat paccelik dan dikembalikan saat panen.

Selain itu juga dilakukan jual beli gabah/beras, dimana keuntungan bisa dibelikan gabah lagi dan untuk pemupukan modal kelompok. LPM Makmur Jaya juga menjadi pemasok di PD Pasar Jaya, Gudang BGR Kelapa Gading, BULOg Bogor, dan BPNT Cakung.

Berkat keberhasilan dalam mengembangkan kegiatan dan usaha, pada tahun 2017 LPM Makmur Jaya memperoleh penghargaan LPM berprestasi tingkat Kabupaten Serang dan Provinsi Banten.

Kelompok lainnya yang juga telah merasakan manfaat dari bantuan pembangunan lumbung adalah Poktan Cimande IV yang berada di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten.

Kelompok ini mendapatkan bantuan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019 untuk pembangunan lumbung pangan dengan kapasitas 70 ton dan sarana pendukung berupa lantai jemur, RMU (kapasitas 1,5 ton/jam) dan rumah RMU. "Keberadaan lumbung sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama saat paccelik bisa meminjam gabah," ujar Ahmad Fauzi selaku ketua kelompok. ● pur

## Kementan RI Apresiasi Keberhasilan Pengelolaan CPPD Kabupaten Serang

SERANG (IM) - Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI mengapresiasi keberhasilan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Serang karena mampu memanfaatkan cadangan pangan saat dibutuhkan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang, Mumun Munawaroh di Serang, Senin (24/5) mengatakan, apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Andriko Noto Susanto saat mengunjungi Gudang CPPD di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang pada Jumat 20-21 Mei 2021.

Mumun seperti diberitakan Antara menjelaskan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan menilai bahwa Pemkab

Serang telah mampu memanfaatkan CPPD, seperti saat bencana tsunami tahun 2018, bantuan saat bencana pandemi Covid-19 tahun 2020 dan penyaluran saat terjadi musibah banjir pada akhir 2020.

Dalam kunjungan tersebut, Mumun mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat juga memberikan masukan terkait perbaikan pengelolaan CPPD untuk masa yang akan datang.

Kementan juga meminta pemerintah daerah agar berkomitmen untuk bisa mengisi gudang dengan bantuan yang meliputi 3 tempat, 2 di antaranya lumbung pangan masyarakat, yakni di Cikande dan Baros, serta gudang penyimpanan CPPD Kabupaten Serang.

Selain mengunjungi gudang penyimpanan CPPD Kabupaten Serang di Kecamatan Kramatwatu, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Andriko Noto Susanto dan jajaran juga

mengunjungi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Makmur Jaya di Kecamatan Cikande dan LPM Cimande IV di Kecamatan Baros.

Adapun tujuan kunjungan adalah untuk melihat efektivitas lumbung dalam menjaga ketahanan pangan serta melihat langsung pengelolaan cadangan pangan Pemerintah daerah Kabupaten Serang.

LPM Makmur Jaya sendiri merupakan salah satu bantuan lumbung yang banyak dibangun Pemerintah Daerah dengan anggaran Pemerintah Pusat pada kurun waktu 2013-2015, dengan bantuan berupa lumbung pangan dan bantuan pengisian lumbung sekitar 4 ton gabah.

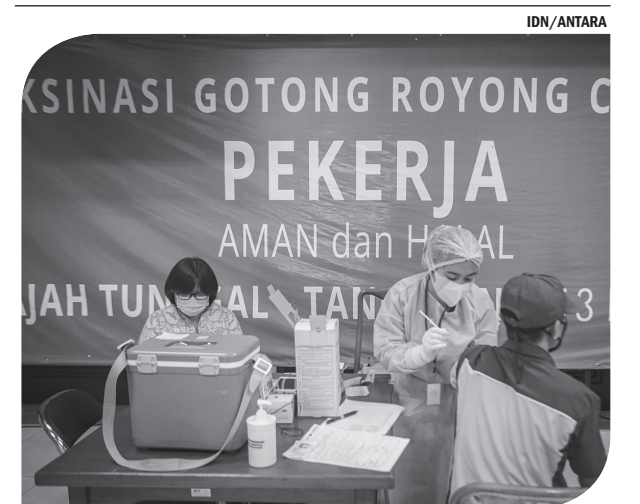
Sementara LPM Cimande IV merupakan LPM yang dibangun pada tahun 2019 meliputi gudang (lumbung) 30-60 ton, RMU (Rice Milling Unit) dengan kapasitas 1-1,5 ton per jam, serta rumah RMU dan lantai jemur. ● yy



IDN/ANTARA

## DAMPAK KENAIKAN HARGA KEDELAI

Pekerja menyelesaikan pembuatan Tahu Cibuntu di Industri Rumah Tangga, Jawa Barat, Senin (24/5). Sejumlah industri pembuatan tahu di Sentra Tahu Cibuntu berencana melakukan mogok produksi mulai dari tanggal 28-30 Mei mendatang akibat tingginya harga kedelai yang mencapai Rp11 ribu per kilo yang membuat kenaikan harga tahu menjadi Rp60 ribu per papan.



IDN/ANTARA

## WAKSINASI GOTONG ROYONG DI TANGERANG

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinopharm di PT Gajah Tunggal Tbk, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (24/5). Sebanyak 1.000 karyawan di perusahaan tersebut mengikuti vaksinasi dari total target sebanyak 5.000 karyawan pada program Vaksinasi Gotong Royong guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional.

## Dewan Cilegon Minta Dindik Tidak Gegabah Tetapkan Lokasi SMP Negeri

CILEGON (IM) - Anggota DPRD Cilegon meminta kepada Dindik Kota Cilegon agar tidak gegabah dalam menetapkan dan mendirikan sekolah menengah pertama negeri. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Cilegon Faturrohmah, usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

"Saat ini tengah terjadi polemik di masyarakat terkait dengan pendirian SMPN. Ada sejumlah lokasi yang akan dijadikan pendirian SMPN, namun sayangnya memicu gelombang penolakan di masyarakat. Makanya kami minta Dindik Cilegon jangan gegabah," katanya, Senin (24/5).

Dia mengatakan, selama ini anggota legislatif mendukung upaya percepatan yang dilakukan oleh Dindik Cilegon dengan adanya SMPN di tiap-tiap daerah. Namun ketika terjadi gelombang diantaranya penolakan, itu juga harus dipikirkan.

"Bisa saja geser, yang tadinya direncanakan untuk memakai gedung tersebut, namun karena ada pertimbangan dari masyarakat terutama wali murid itu juga harus dipikirkan. Kami berharap sekolah baik SD maupun SMPN bisa berjalan bersama," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dindik Kota Cilegon Ismatillah menyatakan, pendirian sekolah tetap akan jalan terus. Namun untuk dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar, pihaknya akan memikirkan ulang.

"Pendirian SMPN baru ini adalah kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan berbagai pihak. Kami juga mendapat dukungan dari Dewan agar pembangunan SMPN itu berlanjut. Kami belum memutuskan untuk lahan baru, akan tetapi ditahun 2021, sekolah baru itu berdiri. Lahan baru atau tidak sedang dibicarakan," ujarnya. ● pp